

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI BALI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM*
GAS TABUNG 3 KILOGRAM KOTA DENPASAR**

OLEH:

Nyoman Angga Dharma Utama¹

Dewa Gede Rudy^{}**

**Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana**

ABSTRAK

Di Indonesia penggunaan LPG sudah sangat marak, dibandingkan dengan bahan bakar lain, LPG lebih menguntungkan. Lebih bersih, stabil, fleksibel dan ramah lingkungan. Adanya kebutuhan LPG 3 kilogram di Kota Denpasar sangat meningkat, maka banyak perusahaan yang mencoba mendistribusikan LPG. Salah satunya adalah Pertamina. Elpiji merupakan brand Pertamina untuk LPG. Spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, LPG propana dan LPG butana.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan *das sollen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan). Masalah yang di bahas dalam jurnal ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 di Kota Denpasar tentang HET LPG subsidi 3 Kg. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pergub Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 tentang HET LPG subsidi 3 Kg. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 di Kota Denpasar tentang HET LPG subsidi 3 Kg dan mengkaji Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan

*Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah diluar skripsi

**Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Nyoman Angga Dharma Utama mahasiswa Fakultas hukum Universitas Udayana
email : anggadharma14@yahoo.com

***Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh Dewa Gede Rudy, SH.,M.Hum adalah dosen Fakultas hukum Universitas Udayana

Pergub Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 tentang HET LPG subsidi 3 Kg.

Hasil penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan perturan gubenur No. 48 tahun 2014 tentang efektivitas harga HET LPG 3 Kg Provisi Bali dinilai tidak efektif karena adanya alur yang cukup panjang melalui mata rantai pemasaran yang telah ditentukan sehingga memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran dalam pendistribusian sehingga terjadinya pelanggaran terhadap harga harga HET LPG 3 Kg Provinsi Bali. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pergub Provinsi Bali No. 48 Tahun 2014 yaitu : Faktor hukum yaitu penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman di antaranya: peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Faktor ekonomi yaitu adanya mata rantai pendistribusian yang cukup panjang mengakibatkan adanya peluang yang besar untuk melakukan pelanggaran seperti menaikkan harga eceran dengan harapan mendapatkan keuntungan. Faktor budaya yaitu ketidak tahuan masyarakat terkait aturan harga eceran gas 3 kilogram, sehingga adanya peningkatan harga sudah dianggap hal yang biasa atau wajar dalam proses perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kerjasama masyarakat dengan dinas perindustrian dan perdagangan kota Denpasar dalam artian sebagian masyarakat itu tidak sepenuhnya menjalankan apa yang telah disampaikan, sosialisasikan dan pemberitahuan pada setiap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg sehingga terkadang menjadi problema dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Kata kunci : LPG, Efektivitas, Harga Eceran.

ABSTRACT

At LPG'S purpose Indonesia have really flared up. Since compared with by fuel any other, More LPG benefit. More clear, stable, flexible and environmentally-friendly. Mark sense LPG'S requirement 3 kilograms at Denpasar's City really increases, therefore a lot of firm that tries to distribute LPG. One of it is PERTAMINA. Elpiji constitutes brand Pertamina to LPG. Its specification, LPG is divided as three types which is LPG half and half, LPG propane and LPG IS butane.

Writing method used in this journal writing empirical juridical method that essentially examines the law in its application in public

*life. The hallmark of empirical juridical research is a study that goes from the *das sollen* gap (theory) to the *das sein* (practice or reality).*

The problem discussed in this journal is how the effectiveness of the implementation of Bali Provincial Governor Regulation No. 48 of 2014 in Denpasar about subsidized HET LPG 3 Kg. What factors affect the effectiveness of the implementation of Bali Provincial Governor Number 48 of 2014 on subsidized HET LPG 3 Kg. To the effect research. To regulation performing effectiveness Governor Number Bali Province: 48 Years 2014 at Denpasar's City about HET LPG subsidies 3 Kg. To dig up and reviewing is factor that regard Pergub Prop's performing effectiveness. Number Bali: 48 Years 2014 about HET LPG subsidies 3 Kg.

Observational result which is regulation Governor performing effectiveness No. 48 years 2014 about HET LPG'S price effectiveness 3 Kg Bali Provision is assessed not effective since marks sense long enough path via marketing link already been determined so gives opportunity for its happening breach in distribution so it's happening breach to HET LPG'S prices 3 Kg Bali Provisions. Factor that regard Pergub's performing effectiveness Bali Province No. 48 Years 2014 which is: Jurisdictional factor which is law enforcer or commissioned person applies to sentence officer shall have a guidance amongst those: given written regulation one ranges its duty assignment scope. Economic factor which is marks sense distribution link that long enough begets to mark sense big opportunity to do breach as raise retail price with expectation gets gain. Cultural factor which is society ignorance concerning ruling retail price gases 3 kilogram, so marks sense price increase be looked on by commonplace or fairly deep process trading to gets gain. It happens since be still its reducing cooperative society with on duty about industry and Denpasar's city commerce in that society not undivided carries on what already be passed on, socialization and notice on each agent and LPG'S gas dealer 3 Kg so sometimes as problems in distribution gases LPG 3 Kg.

Keywords: LPG, Effectiveness, Retail Price.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini membuat adanya peningkatan di beberapa aspek kehidupan. Salah satu yang paling

krusial adalah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi berefek pada peningkatan kebutuhan masyarakat. Masyarakat atau manusia khususnya memiliki 3 kebutuhan pokok yang sangat penting untuk dipenuhi agar masyarakat mampu menyambung kehidupannya. Salah satu kebutuhan pokok tersebut adalah pangan. Pangan adalah suatu kebutuhan pokok yang berupa kebutuhan akan makanan untuk dimakan, dan menjadi sangat penting demi mempertahankan kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut diperlukan sumber energi seperti gas LPG untuk memasak makanan.²

Di Indonesia penggunaan LPG sudah sangat marak, dibandingkan dengan bahan bakar lain, LPG lebih menguntungkan. Lebih bersih, stabil, fleksibel dan ramah lingkungan. Adanya kebutuhan LPG 3 kilogram di Kota Denpasar sangat meningkat, maka banyak perusahaan yang mencoba mendistribusikan LPG. Salah satunya adalah Pertamina. Elpiji merupakan brand Pertamina untuk LPG. Spesifikasinya, LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran, LPG propana dan LPG butana. Spesifikasi masing-masing LPG tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990 Elpiji yang dipasarkan Pertamina adalah LPG campuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskanlah 2 (dua) pokok permasalahan sebagai berikut:

² Pertamina, 2007. *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan LPG 3 Kg Teknik*, Pertamina, Jakarta. h. 53

1. Bagaimana efektivitas ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Denpasar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pergub Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor : 48 Tahun 2014 di Kota Denpasar tentang HET LPG subsidi 3 Kg.
2. Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 48 Tahun 2014 tentang HET LPG subsidi 3 Kg.

II Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati didalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau di dengar dilapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti³. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode

³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, h. 16

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁴. Jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana efektivitas peraturan-peraturan dan mengadakan penelitian langsung kelapangan dalam hal ini pada agen dan pangkalan di wilayah kota Denpasar.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Bagaimana efektivitas ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Denpasar

Salah satu agen LPG subsidi kemasan 3 Kg, PT. Usaha Satuan Sejati, Padangsembian Kaja, Denpasar Barat, diduga curang dengan membina para spekulan. Kecurangan tersebut dilakukannya dengan cara menunjuk orang yang dipercaya membuat pangkalan lebih dari satu, serta menjadikan pangkalan bayangan untuk menyetor data konsumen yang diduga fiktif ke PT. Pertamina. Wawancara dengan Yan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Pengurus gudang agen PT. Usaha Satuan Sejati dengan mudah menaikkan harga gas melon ke tingkat pengecer melewati batas harga distribusi agen ke pangkalan, lantaran tak ada yang protes.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tidak melakukan pengawasan terhadap waktu dalam pendistribusian gas LPG 3Kg di Kota Denpasar. Dengan keadaan yang seperti ini bisa

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, h. 51

memungkinkan terjadi keterlambatan dalam pendistribusian gas LPG 3Kg kepada penyalur dan masyarakat. Pengawasan terhadap Kualitas/mutu dari gas LPG 3 Kg ini kami lakukan dengan langsung mengecek ke lapangan dengan memeriksa tabung-tabung gas LPG 3 Kg apakah benar isinya dari tabung gas LPG ini gas bumi dari Pertamina yang telah di olah atau di isi dengan gas lain yang tidak sesuai, hal ini bisa saja terjadi kalau pemerintah kita tidak ketat mengawasinya”. Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dikatakan mutu dari gas LPG 3 Kg telah di uji oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan dapat dikatakan kualitas dari mutu gas LPG 3 Kg bagus dan tidak terjadi pencampuran dengan gas lainnya. Dan sampai saat sekarang masih terus diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar agar tidak terjadi pencampuran gas dengan bahan gas lain.

Utsaha Sinar Sejati, dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mempunyai pangkalan bayangan. PT Utsaha Sinar sejati yang mempunyai persediaan gas LPG lebih banyak dari perusahaan gas LPG yang lain menaikkan harga gas LPG 3 Kg sebesar Rp. 15.000/tabung hingga Rp, Rp.17.000/tabung bahkan bisa lebih, tergantung situasi di lapangan dan transaksi dilakukan di bawah tangan dengan nota fiktif. Seharusnya agen menjual ke pangkalan menurut Pergub No. 48 Tahun 2014, sebesar Rp. 14.500/tabung dan diantar langsung ke lokasi pangkalan, yang mana telah diatur mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200/tabung. Padahal dengan menjual Rp.14.300/tabung ke pangkalan, agen sudah mendapatkan keuntungan Rp. 1.700/tabung. Dengan perhitungan selisih penebusan Rp. 1.700/tabung dan perhitungan pengantaran ke pangkalan atau

transport fee Rp. 1.060/tabung. Akumulasi transport fee dihitung pengabilan setiap bulan yang dicairkan PT Pertamina ke masing-masing rekening Agen. PT. USS memperoleh alokasi elpiji 3 Kg dari PT Pertamina 6.160 tabung sampai 7.840 tabung, setiap hari yang harus didistribusikan ke pangkalan. Saat ini dilapangan harga elpiji 3 Kg mencapai 20.000/tabung ditingkat konsumen rumah tangga.

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 48 tahun 2014 tentang harga HET LPG 3 Kg Provisi Bali dinilai tidak efektif karena adanya alur yang cukup panjang melalui mata rantai pemasaran yang telah ditentukan sehingga memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran dalam pendistribusian utamanya terjadinya pelanggaran terhadap harga HET LPG 3 Kg untuk Provinsi Bali. Adanya pangkalan bayangan akan menambah jatah gas LPG 3 Kg lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mempunyai pangkalan bayangan. PT Usaha Sinar sejati yang mempunyai persediaan gas LPG lebih banyak dari perusahaan gas LPG yang lain menaikkan harga gas LPG 3 Kg sebesar Rp. 15.000/tabung hingga Rp, Rp.17.000/tabung bahkan bisa lebih, tergantung situasi di lapangan dan transaksi dilakukan di bawah tangan dengan nota fiktif. Seharusnya agen menjual ke pangkalan menurut Pergub No. 48 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Provinsi Bali

Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

2.2.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Denpasar

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵

2. Warga Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang

⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. h. 8

hukum yang diharapkan. Dalam kasus ini kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan harga dari gas lpg tersebut karena merupakan salah satu kebutuhan pokok maka masyarakat akan tetap membayar harga dari gas lpg tersebut tanpa memperdulikan harga gas lpg yang sebenarnya.

3. Penegakan Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.⁶ Namun dalam kasus ini, penegak hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan- peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan- aturan yang telah ditetapkan.

III PENUTUP

3.1 Simpulan

⁶ Indrianto Senoadji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas, Jakarta, h. 28.

1. Efektivitas pelaksanaan pertauran gubenur No. 48 tahun 2014 tentang efektivitas harga HET LPG 3 Kg Provisi Bali dinilai tidak efektif karena adanya alur yang cukup panjang melalui mata rantai pemasaran yang telah ditentukan sehingga memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran dalam pendistribusian sehingga terjadinya pelanggaran terhadap harga HET LPG 3 Kg Provisi Bali. Adanya pangkalan bayangan akan menambah jatah gas LPG 3Kg lebih banyak di Agen tertentu dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mempunyai pangkalan bayangan. PT Usaha Sinar sejati yang mempunyai persediaan gas LPG lebih banyak dari perusahaan gas LPG yang lain menaikkan harga gas LPG 3 Kg sebesar Rp. 15.000/tabung hingga Rp, Rp.17.000/tabung bahkan bisa lebih, tergantung situasi di lapangan dan transaksi dilakukan di bawah tangan dengan nota fiktif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pergub Provinsi Bali No. 48 Tahun 2014 yaitu:
Faktor hukum berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Sebab, suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada ketiga faktor yang telah disebutkan.

3.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG 3 Kg, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dengan evaluasi mata rantai pendistribusiannya dimana komoditi ini termasuk kategori

barang khusus berbahaya namun menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran.

2. Perlu adanya upaya yang serius dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar untuk melakukan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg, melakukan cara-cara terbaru dan terbaik dalam melaksanakan sosialisasi tentang distribusi dan keamanan dalam distribusi gas LPg 3 Kg kepada Agen dan Penyalur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarata, Cetakan keempat.

Pertamina, 2007. *Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunaan LPG 3 Kg Teknik*, Pertamina, Jakarta.

Indrianto Senoadji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Ptroleun Gas Tabung 3 Kilogram.